

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi

2.1.1 Pengertian Demokrasi

Menurut Schumpeter (1950) Secara terminology (istilah), demokrasi pada dasarnya merupakan suatu rancangan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kewenangan untuk menentukan kebijakan melalui proses kompetisi dalam memperebutkan dukungan dan suara rakyat (Hutabarat *et al.*, 2021).

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (1865) adalah “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, suatu pemerintahan dapat disebut demokratis apabila kekuasaan negara berada di bawah kendali rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat (Prayitno, 2023).

Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai proses pengambilan keputusan secara kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang setara, dimana proses tersebut mencakup berbagai persoalan publik dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi serta memengaruhi keputusan-keputusan yang dihasilkan (Anugrahdwi, 2023).

Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan. Melalui kebebasan tersebut, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan turut mengambil bagian dalam proses kekuasaan (Dewantari, 2024).

Harris Soche dalam karya *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berakar pada kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan berada pada rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari segala bentuk tekanan maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, termasuk oleh lembaga atau pejabat yang diberi mandat untuk memerintah (Dewantari, 2024).

Berbagai pandangan di atas menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik semata, tetapi juga sebagai suatu nilai dan prinsip moral dalam kehidupan bernegara. Demokrasi menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Menurut Held (2006, dalam Lestari, 2022), demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, kesetaraan hak, serta akuntabilitas penguasa terhadap rakyat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemerintahan, tetapi juga sebagai tatanan sosial yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab publik.

Dalam konteks modern, konsep demokrasi juga mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. McNair (2017, dalam Rachman, 2023) menjelaskan bahwa munculnya media digital telah mengubah pola interaksi politik antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Media sosial memberikan ruang baru bagi partisipasi publik, di mana warga negara dapat menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta membentuk opini politik secara lebih bebas dan terbuka. Kondisi ini melahirkan bentuk baru dari demokrasi partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam wacana publik.

Senada dengan itu, Norris (2011, dalam Nurdin, 2024) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi politik yang transparan, deliberatif, dan berorientasi pada pertukaran gagasan. Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, praktik demokrasi yang ideal tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari seberapa besar ruang dialog antara rakyat dan pemimpinnya benar-benar terwujud.

Dengan demikian, demokrasi pada hakikatnya merupakan sistem yang berlandaskan partisipasi, kebebasan, dan tanggung jawab bersama. Dalam era digital seperti sekarang, demokrasi tidak lagi hanya terwujud dalam ruang fisik seperti pemilihan umum dan kampanye politik konvensional, tetapi juga dalam ruang virtual tempat warga negara dapat berinteraksi secara langsung dengan para pemimpin dan pembuat kebijakan. Transformasi ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika komunikasi politik kontemporer yang berperan besar dalam membentuk kesadaran dan partisipasi publik di Indonesia.

2.1.2 Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang tidak selalu stabil. Jika ditinjau dari perspektif sejarah, perjalanan demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode utama, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), merupakan periode demokrasi konstitusional yang ditandai dengan dominannya peran parlemen serta partai-partai politik. Karena karakteristik tersebut, masa ini sering disebut sebagai era demokrasi parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin, yang dalam berbagai aspek menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang secara formal menjadi landasannya. Pada masa ini, praktik politik juga memperlihatkan sejumlah ciri yang menyerupai demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) merupakan periode Demokrasi Pancasila, yaitu bentuk demokrasi konstitusional yang menekankan dominasi sistem pemerintahan presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) merupakan periode Reformasi yang berupaya menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sebagai bentuk koreksi terhadap praktik-praktik politik pada masa Republik Indonesia III.

Secara umum, perjalanan demokrasi di Indonesia mencerminkan proses pembelajaran yang terus berlangsung. Demokrasi Indonesia kini tidak hanya diukur melalui keberlangsungan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga melalui kemampuan sistem politik dalam menjamin partisipasi warga negara, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sekarang sudah dianut oleh sebagian besar negara di dunia tidak mungkin memiliki prinsip yang sama pada setiap negara (Budiardjo, 2013). Sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam karyanya *Dasar-dasar Ilmu Politik*, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi landasan bagi terwujudnya suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar yang

harus dipenuhi agar suatu negara dapat menjalankan demokrasi secara efektif. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

Dalam setiap masyarakat, perbedaan pendapat dan kepentingan merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan, dalam konteks demokrasi, dipandang sebagai sesuatu yang sah untuk diperjuangkan. Perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, dialog yang transparan, serta upaya mencapai kesepakatan secara damai. Apabila proses penyelesaian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat potensi munculnya intervensi pihak luar yang dapat memaksakan penyelesaian secara kekerasan, sehingga kompromi atau kesepakatan tidak terbentuk melalui prinsip-prinsip demokratis.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu Masyarakat yang sedang berubah.

Setiap masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, dinamika kepadatan penduduk, perubahan dalam pola perdagangan, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mampu menyesuaikan kebijakan yang diterapkan dengan perubahan-perubahan tersebut agar tetap relevan dan efektif.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

Pergantian kekuasaan yang dilakukan melalui garis keturunan, pengangkatan diri sendiri, ataupun melalui tindakan kudeta dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum

Kelompok minoritas, yang pada kondisi tertentu berpotensi mengalami tekanan, cenderung lebih dapat menerima suatu keputusan apabila mereka diberikan ruang untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif. Melalui kesempatan tersebut, mereka akan merasa lebih dilibatkan dan bertanggung jawab, sehingga lebih terdorong untuk memberikan dukungan, meskipun dengan syarat tertentu.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

Dalam setiap masyarakat, perbedaan pendapat, kepentingan, dan pola perilaku merupakan hal yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, diperlukan tatanan masyarakat yang bersifat terbuka serta menjamin kebebasan politik, sehingga tercipta fleksibilitas dan tersedianya beragam alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, demokrasi kerap dipahami sebagai sebuah gaya hidup. Namun demikian, keberagaman tersebut tetap harus berada dalam batas yang wajar, karena selain pluralitas, masyarakat juga memerlukan unsur persatuan dan integrasi agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara harmonis.

6. Menjamin tegaknya keadilan

Dalam sistem demokrasi, pelanggaran terhadap prinsip keadilan umumnya tidak sering terjadi karena kelompok-kelompok besar memperoleh representasi di lembaga perwakilan. Namun demikian, tetap ada kemungkinan bahwa sebagian kelompok merasa mengalami ketidakadilan. Oleh sebab itu, tingkat keadilan yang dapat diwujudkan lebih bersifat relatif. Keadilan tersebut seringkali hanya dapat dicapai dalam jangka panjang melalui proses politik yang berlangsung secara berkesinambungan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi penyelenggara negara, tetapi juga sebagai panduan etis bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Diamond (2019), keberlangsungan demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai dasar tersebut diinternalisasi oleh warga negara dan diimplementasikan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari.

2.1.4 Klafisifikasi Demokrasi

Menurut Mariana Florence Lay (2021), klasifikasi demokrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat
 - a. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan kebijakan negara (Lay, 2021, p. 42).

b. Demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui system yang artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu (Lay, 2021, p. 42).

2. Atas dasar prinsip ideologi

a. Demokrasi Konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya (Budiarjo, 2008).

b. Demokrasi Rakyat menurut Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin (Lay, 2021, p. 42).

3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya:

a. Demokrasi Formal yaitu, demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi (Zulfikar, 2021).

b. Demokrasi Material adalah demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan (Audina, 2023, p. 523).

c. Demokrasi Gabungan yakni, demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material (Audina, 2023, p. 523)

Secara keseluruhan, klasifikasi demokrasi tersebut menggambarkan bahwa demokrasi bukanlah konsep tunggal, melainkan sebuah spektrum yang luas. Setiap bentuk demokrasi memiliki orientasi, nilai, dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan sejarah dan konteks negaranya. Menurut Norris (2011), keberhasilan suatu sistem demokrasi tidak hanya diukur dari bentuknya, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, keadilan, transparansi, dan kebebasan dapat diwujudkan

dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, memahami klasifikasi demokrasi membantu kita melihat bagaimana praktik demokrasi dijalankan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang terus berupaya menyeimbangkan antara kebebasan politik dan kesejahteraan sosial.

2.2 Komunikasi Politik

Komunikasi politik juga dipandang sebagai proses interaktif yang melibatkan berbagai aktor di dalam sistem politik. Menurut McNair (2011), komunikasi politik tidak hanya terjadi antara politisi dan publik, tetapi juga melibatkan media, partai politik, lembaga pemerintahan, dan kelompok kepentingan. Interaksi ini bersifat timbal balik, di mana pesan politik tidak hanya disampaikan, tetapi juga diterima, ditafsirkan, dan dapat menimbulkan respons dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar alat propaganda, tetapi juga sarana dialog yang memungkinkan pembentukan opini publik serta legitimasi kebijakan.

Selain itu, komunikasi politik memiliki dimensi strategis dan simbolik yang penting dalam membentuk persepsi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Graber (2010), pesan politik dirancang tidak hanya untuk menginformasikan, tetapi juga untuk membangun citra, mempengaruhi sikap, dan menciptakan kesan tertentu terhadap isu atau tokoh politik. Dalam konteks kampanye Pilpres, strategi komunikasi politik mencakup penggunaan simbol, bahasa persuasif, narasi cerita, dan media digital untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada audiens. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dilihat sebagai praktik kompleks yang menggabungkan aspek informasi, persuasi, kontrol sosial, dan konstruksi makna dalam kehidupan demokrasi.

Batasan lainnya menurut Nimmo mendefinisikan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian politik oleh aktor politik kepada masyarakat melalui berbagai saluran (Margaretta, 2025). Dan menurut McNair komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi daripada aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, namun komunikasi yang juga ditujukan kepada para politisi oleh pemilih dan bi politik pada media (Soilihin, 2020). Lord Windlesman dalam karyanya, *What is Political Communications* mendefinisikan komunikasi politik merupakan sebuah penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan komunikator terhadap komunikan dengan memiliki tujuan untuk membuat komunikasi berperilaku tertentu (Amelianti, 2021). Komunikasi Politik memiliki lima unsur penting di dalamnya antara lain:

1. Komunikator Politik yang menyangkut partai politik dan lembaga pemerintahan seperti legislatif dan eksekutif. Dan dengan begitu sumber komunikasi politik mereka dapat memberi informasi tentang berbagai hal yang maknanya mengandung unsur politik (Setiawan, 2019, p. 19).
2. Pesan Politik merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan, secara tertulis maupun tidak tertulis secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi dan terang-terangan, disadari maupun tidak dengan isinya yang mengandung unsur politik. Contohnya seperti pidato politik, pernyataan politik, surat kabar, dan lain-lain (Setiawan, 2019, p. 20).
3. Saluran atau Media Politik adalah alat atau sarana yang mana digunakan oleh setiap komunikator di dalam menyampaikan setiap pesan politiknya. Seperti media cetak dan melalui internet yang mana digunakan untuk membangun citra politik (Setiawan, 2019, p. 20).
4. Yang keempat adalah Sasaran Politik yang dimana adalah masyarakat. Masyarakat yang diharapkan agar dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara atau *vote* kepada partai dan kandidat dalam pemilihan umum (Setiawan, 2019, p. 21).
5. Yang terakhir adalah Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik yang menciptakan pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai politik yang mana masyarakat akan melakukan *vote* atau pemberian suara dalam pemilihan umum. Dan melalui *vote* ini maka pengaruhnya menentukan terpilih atau tidaknya seorang kandidat untuk posisi politik yang dituju (Setiawan, 2019, p. 21).

Secara keseluruhan, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses yang integral dalam sistem demokrasi. Ia tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga membangun interaksi antara rakyat dan pemerintah, menciptakan ruang dialog publik, serta memperkuat legitimasi kekuasaan. Dalam era digital seperti saat ini, komunikasi politik mengalami transformasi besar karena teknologi informasi memungkinkan arus komunikasi yang lebih cepat, interaktif, dan horizontal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menganalisis strategi kampanye dan konstruksi pesan demokrasi, seperti yang tampak pada fenomena kampanye Desak Anies dalam Pemilihan Presiden 2024.

2.3 Teori Komunikasi Politik Brian McNair

Berdasarkan pada latar belakang dan judul di atas, peneliti menggunakan teori komunikasi politik dari Brian McNair sebagai landasan teoritis, karena modelnya termasuk salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam studi komunikasi politik modern. Teori McNair relevan digunakan untuk menganalisis pesan demokrasi dalam kampanye politik, khususnya pada media digital seperti video YouTube Desak Anies di Surabaya. McNair menekankan pentingnya memahami komunikasi politik tidak hanya sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan opini publik, interaksi antaraktor, serta legitimasi keputusan politik (McNair, 2011).

Menurut McNair, komunikasi politik dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, ia mengkaji istilah “komunikasi politik” itu sendiri dan siapa saja para komunikatornya. Dalam membahas politik di era mediasi, kemudian Ia memulai dengan mendeskripsikan pemangku kepentingan utama, termasuk aktor politik seperti partai politik, pejabat publik, dan kelompok kepentingan, yang berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik melalui berbagai saluran komunikasi (Flinders, 2015). Kedua, McNair menekankan pentingnya analisis pesan politik—bagaimana pesan disusun, disebarluaskan, dan diterima oleh publik—sehingga komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses dua arah yang kompleks, melibatkan interaksi antara pengirim pesan, media, dan audiens.

Dengan menggunakan kerangka McNair, penelitian ini tidak hanya menyoroti konten pesan demokrasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan, tetapi juga memeriksa siapa saja aktor yang berperan dalam komunikasi kampanye dan bagaimana pesan tersebut dipersepsikan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis komunikasi politik secara kontekstual, menyeluruh, dan kritis, serta melihat hubungan antara strategi komunikasi, media digital, dan diterima masyarakat dalam konteks demokrasi modern.

Menurut Brian McNair ia membagi komunikasi politik menjadi dua bagian yaitu bagian pertama yang mengkaji istilah “komunikasi politik” dan siapa para komunikatornya. Dalam membahas politik di era mediasi, McNair memberikan pengenalan yang baik tentang prinsip-prinsip normatif demokrasi liberal dan konsep umum tentang ‘pers bebas’. Ia memulai dengan mendeskripsikan pemangku kepentingan utama. Yang mana ia mendefinisikan aktor politik, yaitu mereka yang berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan (partai politik). (Flinders, 2015).

Komunikasi politik oleh McNair juga menjelaskan tentang bagaimana cara-cara di mana media komunikasi massa dapat berkontribusi pada fungsinya, ia juga mengkaji bagaimana komunikasi politik yang dimediasi memberikan wawasan tentang proses komunikasi, masalah metodologis dalam penelitian dampak politik, kemudian bagaimana iklan politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan perilaku pemilih. ia juga meninjau bahwa komunikasi politik yang dimaksud dialektis antara media dan proses politik, yaitu bagaimana media tidak hanya menyampaikan tetapi juga dapat mengubah pesan. (Flinders, p.64, 2015)

Cara berkomunikasi dalam berpolitik di Indonesia telah mengalami perubahan besar seiring dengan teknologi yang semakin berevolusi. sebelum masa sekarang politisi mengandalkan media seperti televisi, koran, dan radio untuk menyebarluaskan pesan politik komunikasi menjadi satu arah dimana hanya terpusat pada saat ditayangkan. Namun, dengan kemunculan era digital melalui sosial media seperti adanya Youtube, Instagram, Twitter bahkan TikTok pembatasan tersebut bukan lagi menjadi sebuah halangan melainkan semua lapisan masyarakat dapat menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan pendapat mereka tentang pesan-pesan politik terkhususnya para elit politik. (Throiq, 2025)

Hal tersebut menghasilkan jenis komunikasi yang pemencaran, melibatkan partisipasi dan bersifat dialog. kondisi tersebut menjadikan aktor politik dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, pembangunan citra mereka serta mengkontekstualisasikan isu politik dengan cara yang lebih jelas dan terstruktur. keuntungan kepada masyarakat juga bukan hanya sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi turut berkontribusi untuk membangun narasi politik melalui komentar, reaksi dan keterlibatan di dalam dunia digital tersebut. (Setiawan, 2019)

Dalam pandangan McNair, perubahan pola komunikasi politik akibat perkembangan teknologi digital ini tidak hanya berdampak pada cara penyampaian pesan, tetapi juga pada struktur kekuasaan informasi dalam politik modern. Media sosial menciptakan ruang di mana arus informasi menjadi lebih horizontal, terbuka, dan demokratis. Hal ini memungkinkan publik untuk berinteraksi langsung dengan aktor politik, memberikan tanggapan, bahkan membentuk opini tandingan terhadap narasi yang dibangun oleh elite politik (McNair, 2017). Proses komunikasi politik tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berkembang menjadi dialog dua arah yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam wacana publik.

McNair juga menekankan bahwa komunikasi politik yang dimediasi oleh teknologi digital mencerminkan bentuk baru dari demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak sekadar menjadi objek persuasi, tetapi juga subjek dalam pembentukan makna politik. Pesan politik di era digital tidak hanya diproduksi oleh politisi dan media, melainkan juga oleh masyarakat yang menafsirkan, menyebarkan, dan memodifikasi pesan tersebut sesuai konteks sosialnya (Flinders, 2015). Oleh karena itu, media sosial berperan ganda: sebagai saluran distribusi pesan politik dan sekaligus sebagai ruang deliberasi publik tempat berlangsungnya diskusi, perdebatan, serta artikulasi gagasan politik secara terbuka.

Dalam konteks penelitian ini, teori McNair menjadi relevan karena menjelaskan bagaimana relasi antara media, aktor politik, dan publik membentuk makna demokrasi melalui proses komunikasi. Fenomena kampanye Desak Anies mencerminkan praktik komunikasi politik yang interaktif dan partisipatif sebagaimana dijelaskan McNair. Program ini memperlihatkan bagaimana teknologi digital digunakan untuk membuka ruang dialog langsung antara calon pemimpin dan masyarakat, memperkuat transparansi politik, serta menegaskan nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam ruang publik virtual. Dengan demikian, teori komunikasi politik McNair menjadi landasan teoretis yang tepat untuk menganalisis bagaimana pesan-pesan demokrasi dikonstruksi dan disebarluaskan melalui media digital pada kampanye politik modern di Indonesia.

2.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini secara khusus diarahkan pada analisis video YouTube Desak Anies #22 Surabaya yang menampilkan kegiatan kampanye dialogis calon presiden Anies Baswedan menjelang Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Melalui tayangan tersebut, peneliti berupaya menafsirkan bagaimana pesan-pesan demokrasi dikonstruksi dan disampaikan kepada publik melalui bentuk komunikasi politik yang dilakukan dalam program Desak Anies.

Penelitian ini menempatkan perhatian utama pada bagaimana unsur-unsur demokrasi (baik demokrasi formal, material, maupun gabungan) diartikulasikan melalui ujaran, simbol, serta interaksi antara Anies Baswedan dengan peserta dialog. Fokus analisis diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam cara komunikasi politik dijalankan, seperti keterbukaan, kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah efektivitas kampanye secara elektoral, strategi pemenangan, atau tanggapan publik terhadap kegiatan tersebut. Sebaliknya, fokus penelitian terletak pada pembacaan isi dan makna pesan demokrasi sebagaimana dibentuk melalui praktik komunikasi politik di ruang publik digital. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi politik Brian McNair, yang menekankan pentingnya melihat hubungan timbal balik antara media, aktor politik, dan masyarakat dalam pembentukan makna politik di era mediasi digital.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dapat dikatakan bahwa masih sangat terbatas literatur yang secara khusus membahas mengenai program Desak Anies, terutama episode Desak Anies #22 Surabaya. Namun demikian, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan tema komunikasi politik, analisis isi pesan demokrasi, serta pemanfaatan media digital dalam kampanye politik yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam penelitian ini. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, penulis berupaya memahami bagaimana studi-studi sebelumnya menelaah hubungan antara media, politik, dan demokrasi, sekaligus menemukan celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar kebaruan dalam penelitian ini:

A. Analisis Isi Suatu Proses Demokrasi

Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul "Analisis Sentimen Komentar Terhadap Tayangan 'LIVE – Anies dan Efek Kejut di Pilkada Jakarta / ROSI' pada Kanal Youtube KOMPASTV: Studi tentang Persepsi Publik di Media Digital" oleh DINA JUNIAR ANGGRAINI, SEPTIAN DWI PUTRI dan MARIA. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sentimen komentar audiens pada tayangan "LIVE – Anies dan Efek Kejut di Pilkada Jakarta / ROSI" pada Kanal Youtube KOMPAS TV untuk mengetahui dan memahami pembicaraan pada media digital. Pada hasilnya Komentar tersebut menekankan adanya kecenderungan bias dalam proses klasifikasi otomatis yang berpotensi menyamarkan atau mengaburkan makna sentimen yang sesungguhnya. Temuan ini melihat begitu pentingnya media digital terkhusus pada Youtube sebagai tempat yang massif dalam komunikasi politik.

Penelitian kedua yang berjudul "Analisis Isi pada Konten Bocor Alus Edisi Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gubran, Golkar Minta Banyak, Jokowi pun Mau, di Youtube TEMPO.CO" oleh Muhammad Subhan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi prinsip, sistematis, objektif, tema utama, serta konteks politik yang disajikan dalam video “Bocor Alus Edisi Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau” yang di kanal Youtube TEMPO.CO. Teori yang digunakan Adalah analisis isi, Uses and Gratification, serta teori ideologi dan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi. Data dikumpulkan melalui pengunduhan video dari kanal YouTube TEMPO.CO dan pembuatan transkrip teks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip sistematis dalam analisis isi dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur untuk mengenali dan mengklasifikasikan unsur-unsur konten media, mulai dari pengelolaan data hingga proses pengkodean dan pembuatan matriks. Prinsip objektif ditekankan melalui upaya menjaga netralitas serta verifikasi data guna meminimalkan bias. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik, peningkatan kualitas penelitian, serta penguatan diskusi publik.

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang berjudul “Analisis Isi Group Facebook Komunitas Peduli Malang Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Malang” oleh Dini Arining Tyas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses demokrasi deliberative pada grup Facebook Komunitas Peduli Malang mengenai kebijakan pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan memakai pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari delapan indikator yang digunakan, terdapat proses deliberative yang berjalan dengan baik dalam grup Facebook Komunitas Peduli Malang. Proses tersebut diukur berdasarkan Key Features of Legislative Deliberation yang dikemukakan oleh John Gastil. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa grup Facebook tersebut berfungsi sebagai ruang publik bagi para anggotanya yang memiliki kesamaan latar belakang, yakni sebagai warga Kota Malang.

B. Pesan Komunikasi Politik

Penelitian keempat adalah penelitian yang berjudul Komunikasi Politik Prabowo Subianto Pada Pilpres 2024 (Analisis Isi Youtube Deddy Corbuzier Episode Omon-Omon Tentang Nasi Goreng Bersama Prabowo) oleh Thoriq Kamal . Penelitian ini berfokus pada bagaimana Prabowo Subianto di kanal Youtube Deddy Corbuzier

menjelang pemilihan presiden 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prabowo menampilkan citra politik yang lebih santai dan dekat dengan publik.

C. Program Desak Anies

Penelitian ini merupakan jurnal yang berjudul "Strategi Komunikasi Desak Anies: Analisis Kampanye Gaya Baru untuk Mencerdaskan Bangsa dan Membangkitkan Semangat Konstitusionalisme dalam Amanat UUD 1945" yang ditulis oleh Fajar Satriawan Wahyudi (Wahyudi, 2024). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konteks negara demokratis, strategi komunikasi kampanye menjadi krusial dalam memperkenalkan calon presiden dan wakil presiden serta menyampaikan visi, misi, gagasan, dan rekam jejak kepada masyarakat. Fungsi kampanye tidak hanya sebatas mendapatkan suara, tetapi juga sebagai platform untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan memenuhi amanah UUD 1945. Penelitian ini menggunakan dan mengeksplorasi konsep "Desak Anies" sebagai strategi kampanye yang menantang status quo dengan cara mempertanyakan dan mendorong diskusi mengenai gagasan dan visi misi calon presiden. Urgensi dari program ini adalah mempertanyakan apakah pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah baru dalam kampanye politik yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa serta memperkuat ketaatan terhadap nilai-nilai konstitusi. Penelitian ini juga menganalisis dampak dan relevansi strategi program tersebut terhadap tatanan politik dan masyarakat, dan penelitian ini berusaha dalam memberikan pemahaman lebih untuk mengenal bagaimana komunikasi kampanye dapat berperan dalam pembentukan kesadaran politik dan kepemimpinan yang berintegritas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses politik, strategi "Desak Anies" menciptakan ruang bagi dialog yang lebih substansial antara pemimpin dan rakyat. Hal tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga meningkatkan kualitas diskusi publik serta pemahaman akan isu-isu politik yang kompleks.